

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Badung (Pembkab Badung) mendapatkan 6 kali opini WTP atas laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2014. Dari opini yang diberikan BPK menjadi indikator laporan keuangan Pembkab Badung sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kelengkapan bukti yang memadai, pengendalian intern yang baik, dan penyusunan yang sesuai dengan undang-undang. Opini WTP dari BPK bukan berarti tidak adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan terdapat beberapa temuan masalah yang ada pada laporan keuangan namun temuan masalah tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan yang diperiksa.

Salah satu elemen penting pada pelaporan keuangan adalah bagian pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penambah nilai kekayaan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi asli daerah, sehingga PAD merupakan salah satu kriteria bagi pemerintah daerah dalam menunjukkan tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2020 peristiwa pandemi Covid-19 membuat

perolehan PAD Pemkab Badung mengalami penurunan, penurunan tersebut dapat dilihat pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Badung pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2019, realisasi APBD Pendapatan Asli Daerah Pemkab Badung sebesar Rp4.217.319.393.186,18, sedangkan pada tahun 2020 realisasi APBD Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.613.756.122.745,06 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.603.563.270.441,12 (Pemerintah Kabupaten Badung, 2020).

Penurunan PAD sebesar -62% disebabkan oleh banyak hal, seperti penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Jawa-Bali (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali yang menghambat kedatangan turis asing mancanegara maupun dalam negeri (Detik News, 2021). Selain itu, penurunan PAD juga berasal dari banyaknya lapangan kerja seperti hotel dan restoran yang mengalami kebangkrutan. Menurut Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, sebanyak 68 hotel mengalami kebangkrutan, bahkan jumlah ini diprediksi akan meningkat jika perekonomian pada Kabupaten Badung masih belum menentu (Radar Bali, 2021).

Melalui KTTA ini, penulis akan memaparkan perubahan yang terjadi pada PAD Pemkab Badung di kala pandemi dengan cara membandingkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada tahun 2017 hingga tahun 2020 pada bagian Pendapatan Asli Daerah untuk melihat perubahan naik/turunnya PAD. KTTA ini juga akan menganalisis pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan daerah dengan membandingkan pada peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akuntansi PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung?
2. Apakah praktik akuntansi PAD telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang digunakan?
3. Bagaimana kinerja keuangan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik akuntansi pada PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
2. Mengetahui apakah sudah terdapat kesesuaian antara penerapan akuntansi PAD dengan ketentuan dan peraturan yang digunakan
3. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di masa pandemi

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang berlokasi di Sempidi, Mengwi, Badung, Bali. Penelitian akan difokuskan untuk meneliti terkait penerapan akuntansi PAD dan kinerja keuangan PAD Pemkab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat akademis maupun manfaat praktis kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Berkontribusi dalam melakukan analisis dan pengembangan pengetahuan terhadap akuntansi PAD

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Karya tulis ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan syarat kelulusan, selain itu penulis berharap agar karya tulis ini mampu menambah wawasan penulis mengenai Analisis dan Akuntansi PAD
- b. Bagi Objek Penelitian Penulis berharap melalui karya tulis ini dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, serta menambah wawasan objek penelitian terhadap penerapan akuntansi persediaan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan dan peraturan yang penulis gunakan.
- c. Bagi Pembaca Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca penerapan praktik akuntansi PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis membutuhkan pendalaman materi, baik yang didapatkan dalam perkuliahan maupun pengetahuan tambahan dan pendukung lainnya yang menunjang penelitian ini. Studi literatur yang penulis lakukan adalah membaca, mengumpulkan, mempelajari dan memahami buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian penelitian terkait dengan akuntansi PAD.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan penulis untuk meninjau kesesuaian antara teori-teori yang telah penulis dapatkan dan pahami dengan praktik sesungguhnya. Observasi ini dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan terkait akuntansi PAD sehingga dihasilkan data kualitatif dan kuantitatif.

Objek yang penulis amati adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan tinjauan atas penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB III Metode dan Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan hasil. Pada bab ini, penulis akan membahas hasil pengumpulan dan pengolahan data berupa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Badung yang mencakup definisi, klasifikasi, pencatatan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membandingkan antara data dengan ketentuan dan

peraturan yang digunakan. Penulis juga akan membahas kinerja keuangan PAD Pemerintah Kabupaten Badung pada masa pandemi, dengan melakukan perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian, Rasio PAD Terhadap Belanja dan Rasio Efektivitas.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pembahasan, biasanya menjawab rumusan masalah dan hubungannya dengan tujuan penulisan